BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini akan membahas beberapa teori yang relevan terkait dengan variabel penelitian, yang diambil dari penelitian sebelumnya serta publikasi yang lebih umum. Adapun kajian pustaka yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Teori Keagenan *(agency theory)*

Agency Theory pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang didasarkan pada perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan suatu organisasi. Teori keagenan berfokus pada perbedaan informasi antara atasan dan bawahan, atau antara kantor pusat dan cabang, yang menciptakan asimetri informasi yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi.(Sambuaga, 2020)

Teori Keagenan berasumsi bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, di mana prinsipal dianggap netral terhadap risiko dan agen cenderung menghindari risiko serta usaha. teori ini, baik agen maupun prinsipal diasumsikan memiliki motivasi yang didorong oleh kepentingan pribadi, yang sering kali saling bertentangan. Teori ini menghasilkan konsep biaya keagenan, yaitu pengorbanan yang timbul akibat hubungan keagenan, termasuk hubungan antara pihak eksekutif dan legislative (Donaldson, 2018).

Keterkaitan Teori Agenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah daerah (sebagai agen) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, dan pemerintah pusat atau masyarakat (sebagai prinsipal) yang berkepentingan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan efisien. hal ini, adanya potensi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat memengaruhi keputusan pengelolaan anggaran, yang berisiko menyebabkan financial distress atau kesulitan keuangan daerah apabila tidak dikelola dengan baik.

2.1.2 Teori *Stewardship theory*

Stewardship theory menyatakan bahwa manajer atau pengelola organisasi tidak didorong oleh tujuan pribadi, melainkan lebih berfokus pada pencapaian hasil yang menguntungkan bagi kepentingan organisasi. Teori ini memandang manajemen sebagai pelayan (*stewards*) yang bertindak dengan kesadaran penuh, kebijaksanaan, dan tanggung jawab untuk kepentingan organisasi (Listyorini, 2022). Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan stakeholder. Selain itu, teori ini juga mengasumsikan adanya hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, di mana steward akan melindungi dan memaksimalkan kinerja organisasi demi kepentingan pemilik. (Sambuaga, 2020).

Stewardship Theory, pemerintah berfungsi sebagai *steward* yang mengelola sumber daya, sementara rakyat sebagai principal adalah pemilik sumber daya tersebut. Terjalin kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal)* yang didasarkan pada kepercayaan dan tujuan bersama yang kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pemberi amanah (*principal*). Hal ini dilakukan dengan mengungkapkan segala informasi terkait, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga teori stewardship relevan diterapkan model organisasi sektor public (Jatmiko, 2020).

2.1.3 Rasio Solvabilitas

2.1.3.1 Pengertian Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun pemerintah daerah, untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk utang dan kewajiban finansial lainnya. Konteks pemerintah daerah, solvabilitas mencerminkan seberapa baik pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangannya untuk memastikan bahwa semua kewajiban dapat dipenuhi tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. (Indriaty, 2018). Solvabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman dengan memanfaatkan seluruh kekayaan yang dimilikinya

atau menggunakan kekayaan sebagai jaminan atas utang yang ada. konteks akuntansi, solvabilitas menjadi konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami, karena hal ini menggambarkan sejauh mana perusahaan memiliki daya untuk melunasi seluruh kewajiban utangnya melalui total aktiva yang dimiliki. Pemahaman tentang solvabilitas perusahaan juga mempengaruhi jenis laporan keuangan yang disusun, yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan terkait kemampuannya dalam memenuhi kewajiban utang. (Halimatusadiah, 2021).

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur persentase besar dana yang berasal dari utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam melunasi kewajiban utangnya. Jika kondisi ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, rasio solvabilitas akan semakin meningkat, dan perusahaan berisiko mengalami financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada utang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya *Financial Distress*. (Islamiyatun, 2021).

Berdasarkan definisi diatas, pengertian Rasio Solvabilitas dapat disimpulkan bahwa Rasio Solvabilitas merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan entitas, baik perusahaan maupun pemerintah daerah, dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas mencerminkan kemampuan melunasi utang melalui total aktiva yang dimiliki. Rasio Solvabilitas mengukur proporsi dana dari utang, di mana penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko *financial distress*. (Indriaty, 2018; Islamiyatun, 2021; Wanda & Halimatusadiah, 2021).

2.1.3.2 Jenis-jenis Solvabilitas

Berikut adalah beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan, diantaranya :

1. Debt to Asset Ratio
2. *Debt to Equity Ratio*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. Times Interest Earned Ratio
5. *Fixed Charge Coverage*

(Kasmir, 2019)

Dari kutipan diatas, dapat dijelaskan jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain :

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah rasio utang yang mengukur hubungan antara total utang dan total aset.Dengan kata lain, seberapa besar utang digunakan untuk membiayai aset organisasi, atau seberapa besar utang mempengaruhi manajemen asset (Kasmir, 2019:). Rumus untuk menghitung *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{\text{Total Debt}}{Total\ Assets}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancer dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan organisasi. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan

untuk jaminan hutang. (Kasmir, 2019). Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* DER adalah sebagai berikut :

$$Debt\ to\ equity\ ratio = \frac{total\ utang\ (debt)}{Ekuitas\ (equity)}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) adalah Rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Ini dilakukan dengan membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh organisasi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang (Kasmir, 2019). Rumus untuk menghitung Long Term Debt to Equity Ratio adalah sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{long\ term\ debt}{equity}$$

4. *Times Interest Earned Ratio* (TIER) adalah kemampuan organisasi untuk membayar bunga dan coverage ratio adalah cara untuk mengetahui sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat organisasi malu karena tidak dapat membayar bunga. Dalam jangka panjang, dapat menghilangkan kepercayaan kreditor. (Kasmir, 2019). Rumus untuk menghitung *Times Interest Earned Ratio* adalah sebagai berikut:

$$Times\ Internet\ Earned = \frac{EBIT\ (Earning\ Before\ Interest\ and\ Tax)}{Beban\ Bunga}$$

5. *Fixed Charge Coverage* (FCC) adalah rasio yang menyerupai $Times\ Internet\ Earned$. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease kontrak). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang (Kasmir, 2019). Rumus untuk menghitung Fixed Charge Coverage adalah sebagai berikut:

$$Fixed\ charge\ coverage = \frac{EBT + Biaya\ Bunga + Kewajiban\ sewa/lease}{Biaya\ Bunga + Kewajiban\ sewa/lease}$$

2.1.3.3 Indikator Rasio Solvabilitas

Indikator yang dipakai penulis dalam mengukur *Lavarage* yaitu *debt equity ratio* dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Ratio ini merupakan suatu ratio yang berguna untuk menjelaskan kewajiban-kewajiban perusahaan dalam melengkapi semua utang yang dimiliki dengan mengunakan semua aktiva, jika perusahaan itu dinyatakan dilikuidasi.

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{\text{Total Debt}}{Total\ Assets}$$

Tabel 2.1
Rasio Solvabilitas yang digunakan oleh penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	DAR	DER	LTDRtER	TIE	FCC
1	Dhani Aspriyadi (2020)		✓			
2	Mouren Tafanazila, Azib (2022)		□			
3	Lian Asti Lestari, Titing Suharti, Diah Yudhawati (2022)		□			
4	Stephanie Angelia Tamba (2017)		□			
5	Asri Jaya Nurlina, A. Tenri Syahrian (2022)			□		
6	AUOLIA (2022)		□			

No	Nama Peneliti	DAR	DER	LTDRtER	TIE	FCC
7	Farah Hafidatul Ardhila (2016)		□			
8	Hanisyah Kholifaturrohmah (2020)		□			
9	Meyda Dewi Trisbiani, Amanatur Rizqiyah, Amira Dian Novita (2020)		□			
10	Sofi Alfia Fitri (2016)		□			
11	Made Desiyanti Dwi Pratiwi W, I Wayan Rupa, LB Made Putra Manuaba (2020)	□				
12	Yogi Indra Gunawan, Suyatmin Waskito Adi (2021)		□			
13	Rian Adrian (2022)		□			
14	Ratna Andira (2018)		□			

Pada penelitian ini penulis mengunakan indikator DER (Debt to Equity Ratio) karena berdasarkan pada Tabel 2.1 seluruh penelitian terdahulu pada umumnya menggunakan indikator tersebut.

2.1.4 Rasio Efisiensi

2.1.4.1 Pengertian Rasio Efisiensi

Konteks ekonomi dan manajemen, rasio efisiensi merupakan suatu indikator yang mengukur perbandingan antara besaran output yang berhasil dihasilkan dengan jumlah input yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara konseptual, rasio ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat efektivitas suatu entitas bisnis, organisasi pemerintah, maupun pelaku usaha dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna memperoleh hasil atau output yang diinginkan. (Abubakar, 2019). Efisiensi berbicara mengenai input dan output. efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihaslkan dengn sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. (Mahmudi, 2019).

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang diterima. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengeluaran modal terhadap pendapatan daerah. (Pinasti & Poerwati, 2022). Rasio efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah. (Kusuma, 2017).

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan pendapatan yang berhasil diperoleh. Konsep ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien sebuah instansi pemerintah dalam menggunakan dana publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Dewi dan Suci, 2023). Analisis ini, rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan yang kurang baik, di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima (Berizky dan Kurniawan, 2024).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan Rasio Efisiensi merupakan indikator penting dalam ekonomi dan manajemen yang mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam suatu proses (Abubakar et al., 2019; Berizky & Kurniawan, 2024; Dewi & Suci, 2023; Kusuma, 2017; Trianto, 2016).

2.1.4.2 Indikator Efisiensi

Rasio Efisiensi digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintahan dalam hal pengelolaan anggaran, penyaluran dana, serta akuntabilitas dalam laporan keuangan. Pemerintah yang berhasil mempertahankan rasio efisiensi yang baik cenderung memiliki manajemen keuangan yang transparan dan bertanggung jawab dalam pendistribusian sumber daya kepada masyarakat (Susanto, 2019). Menurut Dewi dan Suci (2023), menekankan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang efisien memberikan dampak positif dalam peningkatan layanan publik serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Kasmir, 2019).

Rumus untuk menghitung rasio efisiensi menurut (Halim, 2007), adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Rasio efisiensi yang di pergunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh (Halim, 2007). Karena rasio efisiensi merupakan suatu indikator yang dapat mengukur kemampuan menilai efisiensi pengelolaan sumber daya, baik dalam konteks entitas bisnis maupun organisasi pemerintah kepada Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik tingkat efisiensinya, menunjukkan pengelolaan yang optimal. Sebaliknya, rasio yang tinggi dapat mengindikasikan pengelolaan keuangan yang kurang baik, di mana pengeluaran melebihi pendapatan. Dengan demikian, rasio efisiensi memberikan

gambaran yang jelas tentang seberapa efektif suatu instansi pemerintah dalam menggunakan dana publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mendefinisikan sebagai gambaran sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan menggunakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat. (Siregar, 2020). Definisi Kemandirian keuangan adalah kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Keuangan daerah yang mandiri mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. (Malau, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Kemandirian Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, tanpa ketergantungan pada

bantuan dana dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan ini tercermin pada sejauh mana daerah dapat memperoleh dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri.

Kemandirian daerah tercermin dari besarnya Rasio Kemandirian, yang juga menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian daerah, semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, khususnya dari pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. (Siregar, 2020).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi. Rasio kemandirian, yang mengukur perbandingan antara PAD dan penerimaan dari pemerintah pusat atau pinjaman, menunjukkan sejauh mana daerah bergantung pada dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

pembayaran pajak dan retribusi, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. (malau, 2020; Siregar, 2020).

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang dikembang oleh (Halim, 2007) adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{Pendapatan\ asli\ daerah}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat}$$

2.1.5.2 Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan

Beberapa aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi :

a. Pola hubungan Instruktif: Pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah.
b. Pola hubungan Konsultatif: Intervensi pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap lebih mampu menjalankan otonomi.
c. Pola hubungan Partisipatif: Peran pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah tersebut sudah hampir sepenuhnya mampu melaksanakan otonomi daerah.
d. Pola hubungan Delegatif: Tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat karena daerah sudah sepenuhnya mandiri dalam mengelola urusan otonomi daerah. (Halim, 2007)

2.1.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Djuanda, 2007), meliputi :

1. Potensi Ekonomi Daerah: Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah: Kemandirian keuangan daerah dapat diperkuat secara terencana melalui peningkatan kemampuan atau kinerja lembaga yang inovatif, serta pemanfaatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

2.1.6 *Financial Distress*

2.1.6.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi di mana pemerintah atau perusahaan tidak dapat memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan oleh kekurangan dana dan pendapatan yang dihasilkan, serta pengeluaran belanja yang tidak seimbang. *Financial distress* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitas yang didasarkan pada kebijakan yang dimilikinya, baik dalam kebijakan atas aktivitas operasi, pembangunan, utang, maupun infrastruktur lainnya. (Indra, 2020). *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Dalam konteks ini, financial distress mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan kewajiban utangnya (Altman I Edward, 1968). *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan tertentu. Zmijewski menekankan pentingnya likuiditas dan profitabilitas dalam menentukan apakah suatu perusahaan berada dalam kondisi financial distress (Zmijweski, 1984). Financial distress adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Jones & Walker, 2007)

Diranah pemerintah daerah, *financial distress* dapat diartikan sebagai situasi yang mengancam kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan

pelayanan publik akibat adanya masalah keuangan, diantaranya permasalahan arus kas, ketidakmampuan membayar pengeluaran, dan kekurangan pendapatan . *financial distress* juga di artikan sebagai kegagalan kebijakan pemerintah daerah yang mencakup pemenuhan infrastruktur dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. (Pradana & Sarjiyanto, 2023).

Financial Distress pemerintah daerah dapat menggunakan rumus Rasio Belanja Modal. (Mahmudi, 2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Penulis mengukur status *Financial Distress* dalam penelitian ini dengan memproyeksikan Rasio Belanja Modal. Pengukuran ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk investasi jangka panjang yang mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Jika pemerintah daerah tidak mampu mengelola belanja modal secara optimal, hal ini dapat menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kualitas layanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan. Keterbatasan belanja modal ini dapat disebabkan oleh rendahnya sumber daya finansial yang tersedia, yang pada gilirannya menghambat kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, rasio belanja modal yang rendah dapat menjadi indikator risiko *Financial Distress,* yang beotensi mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kewajiban fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Jika Rasio Belanja Modal kurang dari 30% maka termasuk dalam kategori *Financial Distress* dan sebaliknya (M. Sari & Arza, 2019).

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa Financial distress terjadi karena kondisi di mana suatu entitas, baik perusahaan maupun pemerintah, mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Pada perusahaan, kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan utang. Sementara pada pemerintah daerah, financial distress mengancam kemampuan untuk menyediakan pelayanan publik akibat masalah keuangan, seperti kesulitan arus kas, ketidakmampuan membayar pengeluaran, dan kekurangan pendapatan, serta kegagalan dalam pemenuhan infrastruktur dan kebijakan pembangunan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat. (Altman I Edward, 1968; Pradana & Sarjiyanto, 2023; Y. Wulandari & Indra Arza, 2020; Zmijweski, 1984).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nur Isro'atul Lailiyah, Faizal Satria Desitama (2023)	Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah	Variabel Independent Kemandirian Finansial, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Pertumbuhan Variabel Dependen Financial Distress	Kemandirian Finansial dan Rasio Efisiensi berdampak negatif pada Financial Distress
2	Novica Indriaty, Doddy Setiawan, Yuwita Ariessa Pravasanti (2019)	The effects of financial ratio, local size and local status on financial distress	Variabel Independen Rasio Keuangan (CR, D/E, OR/TR, ROA, ROE), Ukuran Lokal, Status Lokal	Rasio keuangan dan ukuran lokal memiliki efek signifikan pada Financial Distress

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen Financial Distress	
3	Christon Elvin Bani Simanjuntak, Farida Titik Krist, Wiwin Aminah (2017)	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress	Variabel Independen Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Pertumbuhan Variabel Dependen Financial Distress	Semua rasio keuangan secara signifikan mempengaruhi prediksi Financial Distress
4	Moh. Haidar Nashrullah, Khomsiyah Khomsiyah (2024)	The Effect of Regional Financial Management on Financial Distress of Local Government in Indonesia	Variabel Independen Kemandirian Finansial, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek Variabel Dependen Financial Distress	Kemandirian finansial dan fleksibilitas berdampak negatif pada tekanan keuangan.
5	Harma Sri Lidia Rahmi, Vita Fitria Sari (2023)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	Variabel Independen Desentralisasi, Luas Wilayah, Kompleksitas Pemerintah Variabel Dependen Financial Distress	Desentralisasi tidak signifikan, Luas Wilayah beengaruh positif, Kompleksitas beengaruh negatif.
6	HUSNUN KARINA BILQIS (2023)	Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Rasio Kemandirian Keuangan Terhadap Rasio Financial Distress Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Variabel Independen Efektivitas, Efisinsi, Kemandirian Keuangan. Variabel Dependen Financial Distress	rasio efisiensi beengaruh positif signifikan terhadap rasio financial distress, rasio kemandirian keuangan beengaruh positif signifikan terhadap rasio financial distress.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7	Dewi Sartika (2017)	Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013	Variabel Independen Kemandirian Keuangan, Desentralisasi, Solvabilitas Variabel Dependen Financial Distress	Kemandirian Keuangan dan Solvabilitas beengaruh, Desentralisasi tidak beengaruh.
8	Dyah Pinasti S[1], Rr. Tjahjaning Poerwat (2022)	Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, efisiensi Dependen: Financial distress	hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa rasio efisiensi beengaruh positif signifikan terhadap Financial Distress, kemandirian keuangan tidak beengaruh negatif signifikan terhadap Financial Distress, sedangkan
9	Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani & Gayatri (2017)	Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Level Of Capital Otlay, Jumlah Penduduk Variabel Dependen: Financial distress	Kemandirian Keuangan beengaruh positif dan signifikan pada Financial Distress. Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi belum tentu dapat memberikan pelayanan dan cukup mampu mengejar peningkatan belanja modal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi pula tingkat kemungkinan terjadinya financial distress karena ketidakefisienan dan ketidaefisiensian dalam masalah penganggaran dan pengrealisasian anggaran. infrastruktur publik yang sesuai dengan standar dikarenakan pendapatan yang diterima oleh daerah tidak sepenuhya dianggarkan untuk belanja modal yang sesuai dengan target yang telah ditentukan, ataupun apabila belanja modal

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				sudah dianggarkan sesuai target tetapi dalam pengrealisasiannya belum
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Variabel**	**Hasil Penelitian**
10	Rida Damai Yanti (2018)	Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012- 2016	Variabel Independen: Short Term Solvency Ratio, Long Term Solvency Ratio, Bugetary Solvency Ratio, Financial Flexibility Ratio, Kemandiran Keuangan (Financial Independence Ratio) Variabel Dependen: Financial distress	Kemandirian Keuangan Beengaruh Negatif terhadap Financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi pada pemerintah daerah cenderung tidak akan mengalami financial distress.
11	Fitrah Illahi, Rice Haryati, dan Dica Lady Silvera (2021)	The Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial distress Of Regency And City Governments In Sumatra Province 2015-2017West	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Keselerasan Belanja Variabel Dependen Financial distress	Kemandirian Keuangan tidak beengaruh positif dalam memprediksi Financial distress. Derajat Desentralisasi tidak beengaruh negatif dalam memprediksi Financial distress. Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Keselerasan Belanja beengaruh secara simultan terhadap Financial Distress.
12	Rahima Zakia dan Fefri Indra Arza (2021)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik PemerintahDaerahTerhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019)	Variabel Independen: Rasio Efektivitas, Efisiensi, Solvabilitas, Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi, Kompleksitas, Luas Wilayah, Opini Audit Variabel Dependen: Financial distress	Derajat Desentralisasi beengaruh negatif terhadap Financial Distress. Hal tersebut menggambarkanbahwa semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi pemerintah daerah maka semakin rendah kecenderungan pemerintah daerah mengalami kondisi financial distress. Derajat desentralisasi pemerintah daerah menandakan kemampuan pemerintah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				daerah dalam mengelola pemerintah daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah yang dapat mengatur, mengelola dan menyusun pemerintah daerahnya sendiri tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang tidak memiliki ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat dapat mengandalkan pendapatan asli daerahnya untuk mengoptimalkan belanja modalnya yang digunakan untuk pelayanan publik yang sesuai dengan standar.
13	Novila Fatmawati, Andriana, Oktaviani Ari Wardhaningrum (2023)	Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Kinerja Keuangan Posisi Keuangan, Efisiensi, Kompleksitas Pemerintah Variabel Dependen Financial Distress	Hanya variabel kompleksitas pemerintah yang beengaruh terhadap prediksi financial distress.
14	Annisa Haryanti, Sandrayati & Yevi Dwitayanti (2022)	Pengaruh Derajat Desentralisasi Dan Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemda Kabupaten/Kota Sumsel Periode 2016-2020	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi Fiskal dan Budgetary Solvency Ratio Variabel Dependen: Financial distress	Derajat Desentralisasi Fiskal beengaruh negatif terhadap Financial distress. Hal ini berarti Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi financial distress.
15	Fibrian Cahyo Pranoto, Handoko	Determinan Financial distress Pemerintah	Variabel Independen:	Kemandirian Keuangan beengaruh negatif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Arwi Hasthoro dan Nurwiyant a (2022)	Daerah	Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Jumlah Penduduk	terhadap Financial distress. Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran di luar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami financial distress. Derajat Desentralisasi Fiskal beengaruh negatif terhadap Financial distress. Hal ini berarti Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi financial distress dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat. transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki
16	Ilham Pradana, Sarjiyanto (2023)	Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah	Variabel Independen: rasio efektivitas, rasio efisiensi Variabel Dependen : Financial Distress	berdasarkan penelitian, financial distress dipengaruhi secara signifikan oleh populasi, efektivitas dan rasio efisinsi. sementara itu rasio pertumbuhan dan keuangan independensi tidak beengaruh
17	Fibrian Cahyo Pranoto (2022)	Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah	Variabel Independen: rasio efektivitas, desentralisasi, kemandirian keuangan Variabel	Hasil penelitian menunjukan bahwa kemandirian keuangan beengaruh negatif terhadap financial distress Pemerintah Daerah, derajat desentralisasi fiskal beengaruh negatif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Dependen : Financial Distress	terhadap financial distress Pemerintah Daerah, jumlah penduduk beengaruh positif terhadap financial distress Pemerintah Daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Financial Distress*

Sesuai pandangan teori Keagenan, menjelaskan bahwa pada pemerintah daerah (sebagai agen) harus mengelola sumber daya keuangan dengan baik untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat (sebagai prinsipal). Teori ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tingkat solvabilitas yang baik, pemerintah daerah tidak hanya menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, tetapi juga membangun kepercayaan di antara masyarakat dan pemangku kepentingan. (Aziz, 2024)

Teori Keagenan juga menggarisbawahi potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemerintah daerah sebagai agen mungkin memiliki insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar, yang dapat mengarah pada keputusan tidak optimal dan meningkatkan risiko financial distress. Namun, dengan menjaga rasio solvabilitas yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko tersebut dan memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengorbankan pelayanan publik.(Aziz, 2024)

Selain itu, teori Keagenan menunjukkan bahwa asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika masyarakat merasa pemerintah tidak transparan, kepercayaan mereka dapat menurun, berdampak negatif pada Rasio Solvabillitas daerah. Oleh karena itu, menjaga solvabilitas yang baik penting untuk menghindari financial distress dan membangun hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Muuna 2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan bahwa Solvabilitas beengaruh negatif terhadap Financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah yang memiliki tingkat Solvabilitas yang baik cenderung tidak akan mengalami *financial distress*, karena pemerintah daerah tersebut dapat melunas hutang dan kewajiban jangka panjang pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil penelitian bahwa Solvabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap *Financial Distress*. (Sartika, 2016; Nugraeni, 2018; Fatmawati., 2023; Lailiyah, 2023; Rahmi, 2023)

2.2.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap *Financial Distress*

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress, sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan bahwa manajemen yang bertindak sebagai *steward* harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan publik. Teori ini berargumen bahwa Pemerintah yang baik akan berfokus pada pencapaian hasil yang optimal, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah juga beeran

penting dalam menentukan kondisi *financial distress*. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin buruk kinerja pemerintah daerah karena tidak efisien dalam mengalokasikan pendapatan yang ada untuk dibelanjakan, yang akan menyebabkan kekurangan dana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rasio Efisiensi yang tinggi menunjukkan betapa buruknya pengelolaan dana belanja oleh pemerintah daerah, yang mengakibatkan sedikitnya uang untuk digunakan belanja modal yang pada akhirnya membuat pembayar pajak berada dalam situasi keuangan yang sulit. Dalam konteks ini, efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan daerah. Yang mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Efisiesi beengaruh positif terhadap *Financial distress.* Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah yang memiliki tingkat efisiensi yang baik cenderung tidak akan mengalami *financial distress.* Karena semakin tinggi tingkat rasio efisiensi menggambarkan kinerja keuangan pemerintah yang kurang bagus dalam mengalokasikan pengeluaran akan tetapi rasio efisiensi tidak dapat secara langsung menggambarkan kondisi *financial distress* pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil penelitian bahwa efisiensi mempunyai pengaruh positif terhadap *Financial Distress* (Pradana 2023, Sartika, 2016; Nugraeni, 2018; Lailiyah, 2023; Rahmi, 2023)

2.2.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Sesuai pandangan teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah daerah, sebagai *steward*, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya demi kepentingan publik; kemandirian keuangan yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko *financial distress* akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisispasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa kemandirian keuangan beengaruh negatif terhadap *Financial distress.* Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, cenderung tidak akan mengalami *financial distress.* Hal ini disebabkan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal, seperti pajak dan retribusi, sehingga dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang kuat tidak hanya meningkatkan stabilitas keuangan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Sartika, 2016; Nugraeni, 2018; Fatmawati., 2023; Lailiyah, 2023; Rahmi, 2023)

2.2.4 Paradigma Penelitian

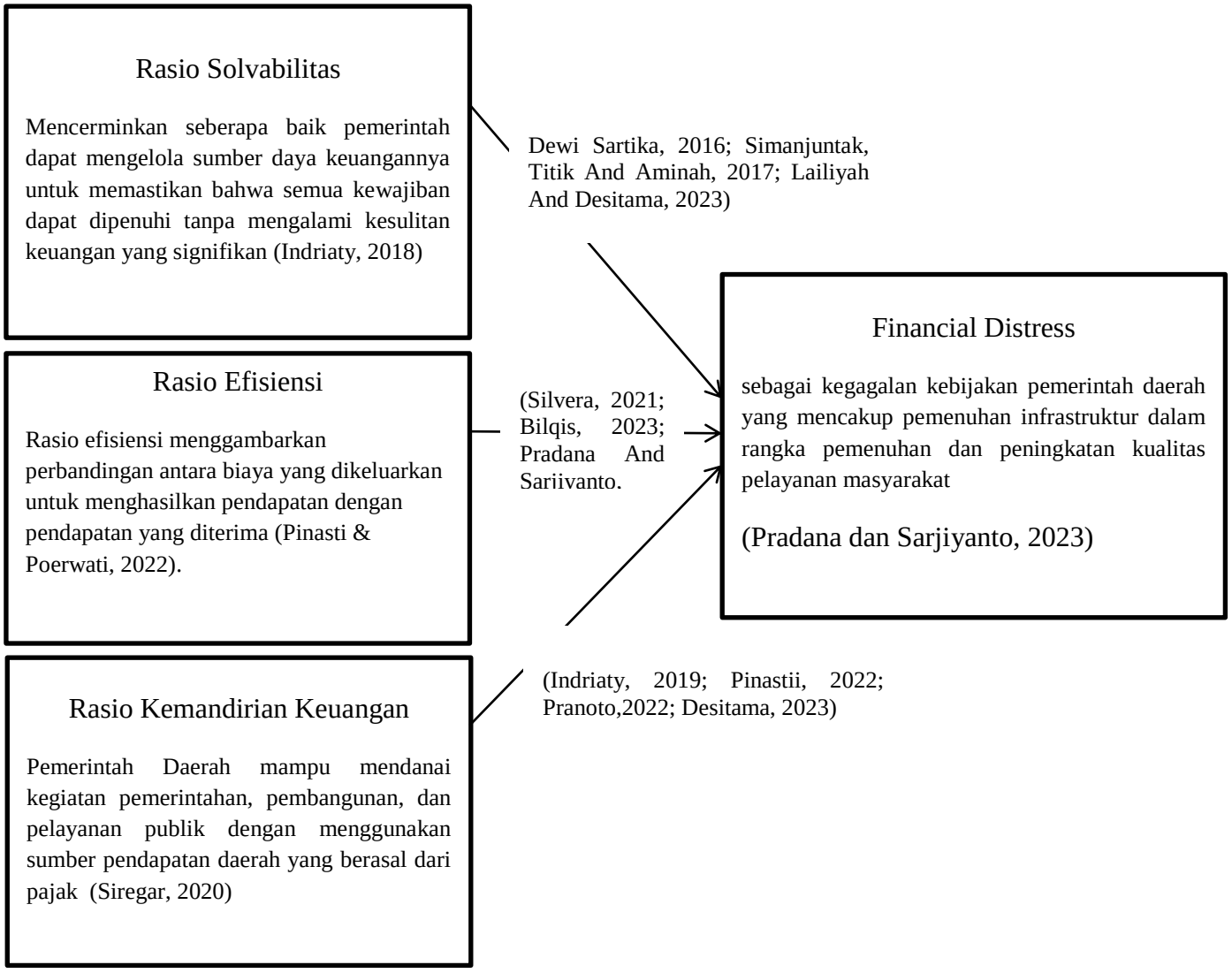

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2022)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakakan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Rasio Solvabilitas Beengaruh Negatif terhadap *Financial Distress*.

H_2 : Rasio Efisiensi Beengaruh Positif terhadap *Financial Distress.*

H_3 : Kemandirian Keuangan Beengaruh Negatif terhadap *Financial Distress.*